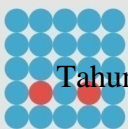




Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB, tahun 2005



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Propinsi Maluku Utara sebagai salah satu propinsi kepulauan di Indonesia yang baru dibentuk dengan Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999, merupakan pemekaran dari Propinsi Maluku sebagai propinsi induk. Secara geografis Propinsi Maluku Utara terletak pada 124° - 129° Bujur Timur dan 3° Lintang Utara sampai dengan 3° Lintang Selatan, terbentang dari utara ke selatan sepanjang 770 km, dari barat ke timur 660 km, dengan luas wilayah keseluruhan adalah $140.255,36 \text{ km}^2$, terdiri dari 76,27% lautan dan 23,72% daratan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan Samudra Pasifik;
- sebelah Timur dengan Laut Halmahera;
- sebelah Selatan dengan Laut Seram;
- sebelah Barat dengan Laut Maluku.

Secara administratif Propinsi Maluku Utara meliputi 6 (enam) kabupaten (Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah dan Sula Kepulauan) dan 2 (dua) kota (Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan), terdiri dari 45 kecamatan, 86 kelurahan dan 644 desa.

Berdasarkan hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2002, jumlah penduduk Propinsi Maluku Utara adalah kurang lebih 833.618 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,9% per tahun, sedangkan sumber mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani dan nelayan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



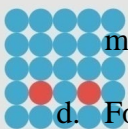
Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dengan kondisi daerah baru yang dimekarkan, maka Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara harus dapat mengejar ketertinggalan pembangunan dan pemberdayaan di semua level hidup dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Salah satu aspek yang sangat vital dan bahkan krusial yang harus ditangani secara serius oleh Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara adalah berupaya membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya sumber daya aparatur pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan maupun kemasyarakatan pada semua lini kehidupan.

Menurut Mangkuprawira (2003), bahwa ada 6 (enam) unsur penting dalam pendekatan strategik manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang meliputi :

- a. Pemahaman tentang pengaruh lingkungan luar
Lingkungan luar dapat berupa kesempatan dan ancaman dalam bentuk hukum, kondisi ekonomi, perubahan sosial dan demografi, tekanan politik dalam negeri dan internasional, teknologi dan sebagainya.
- b. Pemahaman pengaruh dinamika dan persaingan pasar kerja
Dinamika tingkat upah, tingkat pengangguran, kondisi pekerjaan, tingkat manfaat, peraturan upah minimum dan reputasi pesaing di pasar tenaga kerja.
- c. Fokus jangka panjang
Bagaimana perusahaan (organisasi kedinasan) mengembangkan strategi yang taat asas untuk mengarahkan suatu perusahaan (organisasi kedinasan) menuju masa depan.
- d. Fokus terhadap pilihan dan pengambilan keputusan

Setiap pengambilan keputusan tentang SDM harus komit dengan sumber daya organisasi menuju arah yang utama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

e. Pertumbuhan seluruh personil

Pendekatan kepentingan kepada seluruh karyawan / personil perusahaan/organisasi, minimal dari pimpinan top sampai pada karyawan yang tidak terdidik (operator).

f. Integrasi dengan strategi perusahaan

Strategi SDM yang utama diterapkan oleh sebuah perusahaan (organisasi kedinasan) seharusnya diintegrasikan dengan strategi perusahaan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang diindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara yang mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan semua program nasional ketransmigrasian yang merupakan bagian program Pembangunan Nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*), akan semakin berat peran pelayanan kepada masyarakat/transmigran secara profesional.

Secara keseluruhan ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara dalam kinerja pelayanan secara baik kepada publik/masyarakat dan khususnya pada

program ketransmigrasian tentang pelaksanaan transmigrasi dimasa lalu antara lain :

Calon lokasi untuk permukiman transmigrasi baru belum siap ditempati (*clear clean*), tapi sudah diprogramkan dan dilaksanakan ;



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

- ☛ Pada beberapa UPT terjadi tumpang tindih lahan usaha dengan peruntukkan lain dan kepastian hak untuk lahan usaha warga transmigrasi belum tuntas (ada sertifikat hak milik tapi lahan usahanya tidak ada) ;
- ☛ Letak lokasi pemukiman transmigrasi tersebar dan tidak dalam konteks membentuk kawasan sehingga tidak ekonomis ;
- ☛ Kurangnya tenaga lintas sektoral (seperti petugas penyuluh pertanian lapangan, petugas kesehatan, tenaga pendidik dan pembina koperasi dan lain sebagainya) dilokasi UPT, sehingga manfaat dari pembinaan tersebut belum mencapai hasil yang optimal ;
- ☛ Terbatasnya sarana fisik berupa infra struktur antara lain jalan dan jembatan, pasar desa, kantor pos serta fasilitas umum lainnya ;
- ☛ Dukungan sumber daya manusia aparatur dinas yang handal, berkualitas dan berkompetensi dalam suatu sistem organisasi yang efisien dan efektif serta profesional masih sangat terbatas.

Dengan mencermati kondisi permasalahan diatas tersebut, maka kedepannya perlu dilakukan perbaikan kinerja pelayanan program ketransmigrasian oleh dinas yang bersangkutan yang berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya, terutama menyangkut tentang kualitas pelayanan oleh aparatur kepada masyarakat dan transmigran di pemukiman transmigrasi secara lebih baik lagi.

Pendekatan pembangunan transmigrasi secara nasional saat ini adalah dalam kerangka kebijakan otonomi daerah yang mengarah pada permintaan atau kebutuhan daerah, yang dalam pelaksanaannya senantiasa mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Secara empirik dapat dikenali bahwa



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya buatan, secara nyata belum optimal didayagunakan bagi kebutuhan pembangunan yang sasaran utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya transmigran.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan sumberdaya, maka dibutuhkan suatu sinergisitas dan kolaborasi secara terpadu antara pelaku-pelaku ekonomi yang terdiri atas pemerintah, masyarakat (*stake holder*) dan pihak swasta untuk mendukung terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan/permukiman transmigrasi. Sehingga upaya pemerintah dalam memfasilitasi pendayagunaan sumberdaya serta memberdayakan masyarakat (khususnya transmigran) di kawasan transmigrasi, memerlukan suatu pedoman pelaksanaan yang difungsikan sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas bagi para petugas/aparatur dan berbagai pihak terkait.

Menindaklanjuti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, maka Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, maka Dinas Tenaga Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara, telah melakukan berbagai langkah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan transmigran di kawasan transmigrasi yang disinkronkan dengan program ketransmigrasian secara nasional, yang salah satu tujuan mendasar adalah meningkatkan kesejahteraan transmigran (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) dengan berbagai program ketransmigrasian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor
MB-IPB



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Salah satu rangkaian program pembangunan ketransmigrasian yang sangat mendasar, yaitu program penyiapan, pengarahan, penempatan, pembinaan dan pemberdayaan transmigrasi serta pengembangan kawasan dan permukiman transmigrasi. Sedangkan untuk menyukseskan program pembangunan ketransmigrasian tersebut, maka kualitas pelayanan aparatur dinas seperti memfasilitasi, merespon, menindaklanjuti semua kebutuhan transmigran dan masyarakat di sekitar permukiman baik diminta maupun tidak diminta harus terlaksana secara baik dan terencana serta transparan.

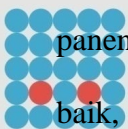
Adapun sasaran dari program pembangunan transmigrasi ini adalah :

☞ Untuk mewujudkan penyebaran dan mobilitas penduduk yang merata dan seimbang sesuai dengan daya dukung (*carrying capacity*) alam dan daya tampung lingkungan ;

☞ Mewujudkan pengembangan kawasan permukiman transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Menyangkut dengan pengembangan perekonomian yang dilakukan oleh transmigran di permukiman transmigrasi, hanyalah sebatas pada kegiatan produksi (*on-farm*) belum sampai pada tingkat industri pengolahan hasil (*off-farm*) seperti industri pakan dan pemasaran yang merupakan kendala terbesar warga transmigran di permukiman transmigrasi yang ada di propinsi Maluku Utara.

Hal ini disebabkan, akses pemasaran yang harus diciptakan untuk penanggulangan panen hasil transmigran oleh pemerintah setempat tidak bisa terlaksana dengan baik, berhubung karena pembangunan sarana fisik (infra struktur) seperti sarana perhubungan, jalan, jembatan dan sarana fisik umum penunjang lainnya pada beberapa waktu lalu dibangun menjadi hancur dan porak poranda akibat tragedi



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

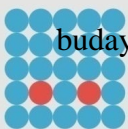


Hak cipta dilindungi Undang-Undang

kemanusiaan berupa konflik komunal yang melanda propinsi ini. Dengan kondisi seperti dipaparkan diatas, maka banyak warga (transmigran yang sebagian besar merupakan transmigran umum yang didatangkan dari luar daerah propinsi Maluku Utara) berusaha menyelamatkan diri dari permukiman transmigrasi ke daerah-daerah yang dianggap aman untuk berlindung sementara waktu dan bahkan ada yang langsung meninggalkan propinsi ini kembali ke daerah asalnya, sambil menunggu kepastian dan jaminan dari pemerintah daerah setempat serta melihat kondisi yang kondusif untuk mereka kembali ke permukiman semula.

Fenomena diatas tersebut sangat bertolak belakang pada saat kondisi daerah normal, di mana pada waktu sebelum konflik komunal yang melanda propinsi Maluku Utara banyak hasil panen transmigran (biasanya berupa tanaman pekarangan lahan kering yang dihasilkan oleh transmigran yang ada di UPT Togoliua Tobelo dan tanaman padi sawah berupa hasil beras yang dihasilkan oleh transmigran yang ada di UPT Kobekulo Weda) yang diangkut dan dijual ke konsumen akhir di pasar-pasar tradisional yang ada di sekitar permukiman transmigrasi dan juga dibawah ke pasar umum biasanya terdapat di ibukota kecamatan dan kabupaten dan bahkan ada yang langsung menjualnya ke pasar ibukota propinsi oleh transmigrannya sendiri tanpa perantara. Biasanya transmigran tersebut menjual hasil panennya tidak sendiri-sendiri tetapi mereka membentuk kelompok seperti kelompok paguyuban sesuai dengan budaya transmigran yang berasal dari pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

Mencermati kondisi daerah pada saat konflik kemanusiaan sebelum terjadi, maka kebutuhan akan bahan pangan dari hasil pertanian yang dihasilkan oleh transmigran yang ada di propinsi Maluku Utara ini, biasanya stok pangan



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB, tahun 2005



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

untuk kebutuhan masyarakat lokal secara keseluruhan bisa terpenuhi tanpa harus mendatangkan impor pangan dari daerah lain di Indonesia (biasanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan di daerah ini, pemerintah daerah propinsi Maluku Utara selalu mengimpornya dari propinsi Sulawesi Utara khususnya Manado dan dari propinsi Jawa Timur khususnya Surabaya). Imbas dari semua persoalan yang melanda daerah ini, maka kondisi sektor perekonomian dan sektor keamanan sebagai pendukungnya keberhasilan program ketrasmigrasian di propinsi Maluku Utara ini, untuk sementara boleh dikatakan lumpuh untuk beberapa jangka waktu lamanya. Apalagi transmigran boleh dikatakan sebagai tulang punggung yang menggerakkan sektor perekonomian di daerah ini di samping sektor-sektor lain dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada dan membina yang dilakukan oleh penduduk setempat, namun masih jauh dari tingkat pemanfaatan yang efisien dan tepat sasaran guna menunjang roda perekonomian daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan dan berkesinambungan.

Belajar dari pengalaman tragedi kemanusiaan di atas, maka untuk kedepannya pemerintah daerah propinsi Maluku Utara banyak mengambil hikmah dengan melakukan berbagai terobosan berupa program rekonsiliasi guna menormalkan kembali kondisi daerah yang porak poranda terutama menyangkut dengan kondisi perekonomian daerah yang notabeneanya banyak yang diproduksi/dihasilkan dari transmigran secara umum akan kebutuhan dan pasokan pangan bagi daerah tersebut.

Sebagai ilustrasi, maka data terakhir yang disajikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (baik Kabupaten maupun Propinsi setelah dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

perhitungan/*cross check* bersama) pada tahun 2003, terdapat kurang lebih 275 KK atau 726 jiwa yang telah kembali/dilakukan pemulangan secara resmi ke lokasi transmigrasi Maluku Utara.

Mereka terdiri dari 223 KK atau 558 jiwa yang berasal dari Jawa Timur, 43 KK atau 130 jiwa dari Jawa Tengah dan 9 KK atau 38 jiwa dari Jawa Barat. Upacara pelepasan atau keberangkatan mereka dari Asrama Transito Dinas Kependudukan Jawa Timur yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dihadiri oleh jajaran anggota DPRD yang membidangi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Propinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara pada tanggal 12 Agustus 2003. Para pengungsi adalah transmigran yang kembali ke tempat asal saat konflik komunal berkecamuk di Propinsi Maluku Utara pada tahun 1999 lalu. Pemulangan pengungsi eks transmigran tersebut, mereka dibekali dengan bantuan biaya kebutuhan hidup selama tiga bulan, lahan dua hektar untuk masing-masing kepala keluarga (KK), alat-alat pertanian serta asuransi dengan pertanggungan Rp. 2.000.000 – Rp. 4.000.000 per orang.

Selain terdapat beberapa permasalahan pokok diatas yang menyangkut dengan persoalan pengembangan perekonomian daerah ke depan yang lebih baik, maka faktor koordinasi antar instansi terkait juga sangat mempengaruhi kinerja

pelayanan aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara dalam pelayanan kepada masyarakat (khususnya transmigran) yang antara lain menyangkut kualitas aparatur pelayanan disamping keterbatasan pembangunan sarana dan prasarana fisik (infra struktur) seperti pembangunan jalan sebagai



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MIB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

media transportasi untuk mengangkut hasil panen berupa padi, palawija, sayur mayur dan sebagainya yang berimbas kepada akses pemasaran hasil tersebut. Hal ini berdampak pada ketersediaan dana/anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI) kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (baik di Kabupaten maupun Propinsi) tidak proporsional sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pembangunan infra struktur tersebut. Belum lagi persoalan pokok yang masih teringat dalam benak kita tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Propinsi Maluku Utara beberapa waktu lalu berupa kerusuhan komunal, sehingga berimbas kepada kembalinya/kembalinya para transmigran ke daerah asal mereka untuk mengungsi ke tempat/daerah lain yang dianggap lebih aman untuk jangka waktu tertentu.

Dengan terbatasnya sarana dan prasarana fisik seperti disebutkan diatas, maka kinerja pelayanan aparatur dari dinas yang bersangkutan terhadap transmigran menjadi kurang optimal dan memuaskan. Padahal kita tahu, bahwa setiap aparatur selain memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab, juga punya hak untuk menggunakan sarana dan prasarana bagi organisasi/dinas yang bersangkutan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan bahkan profesional, sehingga karena keterbatasan sarana dan prasarana fisik tersebut, maka niat baik memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan murah kepada masyarakat (khususnya transmigran) sering kali menjadi terganggu.

Dengan demikian, maka keterkaitan beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja pelayanan kepada publik/masyarakat (khususnya transmigran) dapat dipaparkan disini :



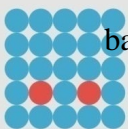
MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1. Belum memadainya dukungan anggaran yang ditopang oleh adanya pengalaman serta telah dihayatinya etos dan pegangan/acuan, sikap/perilaku dan etos kerja yang diwariskan oleh sejarah masa lalu yang memerlukan pembelajaran menyebabkan belum dapat diterapkannya manajemen pelayanan publik dalam konteks “*Total Quality Management*” dalam era reformasi yang berciri desentralisasi ;
2. Belum terseleksinya pilihan kiat, metode dan teknologi pelayanan yang mampu mengubah orientasi manajemen pelayanan konvensional ke pelayanan yang berorientasi pada etos dan budaya manajemen pelayanan publik yang berkualitas ;
3. Masih belum seimbangya hak dan kewajiban yang melayani dan dilayani dalam pemberian kontraprestasi yang sepadan atas kontribusi yang diberikan masyarakat ;
4. Masih belum diadakan internalisasi nuansa administrasi politik yang bahkan berakibat jauh terhadap penerapan konsep “*local government productivity*” yang masih mengandung keretakan dalam penyelenggaraan manajemen pelayanan publik ;
5. Belum dapat diterapkannya konsep layanan prima sekaligus adanya sindroma hubungan antara yang melayani dengan yang dilayani dalam kedudukan sebagai pelanggan, yang mempunyai hak politik yang menerima manfaat barang dan jasa produk pemerintah dan kelompok sasaran (*target group*).

Khusus tentang dampak dari implementasi pemberlakuan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah diberi peluang untuk dapat berinvestasi terutama di bidang ekonomi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber ;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

perdagangan dengan mengacu pada rambu-rambu yang telah ditetapkan dan selalu bernaung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disini Pemerintah Pusat dalam hal tertentu masih memiliki kewenangan seperti bila diadakan perjanjian kerjasama perdagangan dibidang perekonomian antara suatu daerah dengan negara tetangga, maka Pemerintah Pusat harus mengetahuinya. Karena hal ini menyangkut tentang kebijakan/peraturan dan fasilitasi oleh Pemerintah Pusat untuk melindungi Pemerintah Daerah yang akan mengadakan perjanjian kerjasama dengan negara tetangga tersebut.

Daryanto (2004) mengatakan bahwa mengapa perlunya Pemerintah Pusat turut campur tangan dalam perdagangan internasional (misalnya terjadi transaksi pembelian dan pembayaran hasil produk agroindustri dan produk agribisnis seperti hasil tanaman perkebunan, tanaman keras/kehutanan, hortikultura dan lain-lain dari daerah yang bersangkutan dengan negara tetangga). Hal ini dikarenakan, Pemerintah Pusat (dapat diasumsikan juga pada Pemerintah Daerah) harus dapat memberi perlindungan/proteksi kepada warganya terhadap berbagai pengaruh budaya asing yang negatif, sebagai akibat dari implementasi globalisasi perdagangan internasional tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan beberapa masalah sebagai

berikut :

- a. Sampai sejauhmana kepentingan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara terhadap transmigran ;

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

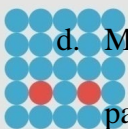
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- b. Sampai sejauhmana kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara terhadap transmigran ;
- c. Bagaimana harapan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara terhadap transmigran ;
- d. Sampai sejauhmanakah hubungan antara kepentingan, kepuasan dan harapan pelayanan berdasarkan berbagai atribut dimensi pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara terhadap transmigran.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis kepentingan pelayanan berdasarkan berbagai atribut dimensi pelayanan dari aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara terhadap transmigran di permukiman transmigrasi ;
- b. Menganalisis kepuasan pelayanan berdasarkan berbagai atribut dimensi pelayanan dari aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara terhadap transmigran di permukiman transmigrasi ;
- c. Menganalisis harapan pelayanan berdasarkan berbagai atribut dimensi pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara terhadap transmigran di permukiman transmigrasi ;
- d. Menganalisis hubungan antara kepentingan, kepuasan dan harapan pelayanan pada berbagai atribut dimensi pelayanan oleh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara terhadap transmigran.



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor
MB-IPB



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

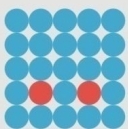
1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai masukan dan acuan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai penyelenggara Program Nasional di bidang ketransmigrasian tentang kinerja kualitas pelayanan aparatur kepada transmigran di permukiman transmigrasi ;
- b. Sebagai masukan dan rujukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) tentang sinkronisasi Program Nasional Ketransmigrasian dengan Pemerintah Propinsi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan dibatasi dengan melihat dan memilih lokasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Propinsi Maluku Utara, yaitu pada UPT Togoliua Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara dengan jumlah transmigran sebanyak 200 kepala keluarga (KK) dan UPT Kobekulo Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dengan jumlah transmigran sebanyak 550 kepala keluarga (KK).



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.